

IMPLEMENTASI *SMART MARITIME DIPLOMACY* INDONESIA

DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN



OLEH:

VIVI USMAN

E061171009

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI *SMART MARITIME DIPLOMACY* INDONESIA DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN**

SKRIPSI

Disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada

Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Univeristas Hasanuddin

OLEH:

VIVI USMAN

E061171009

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKUTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : IMPLEMENTASI *SMART MARITIME DIPLOMACY* INDONESIA
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

N A M A : VIVI USMAN

N I M : E061171009

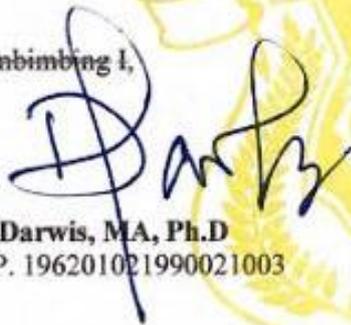
DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 28 Januari 2022

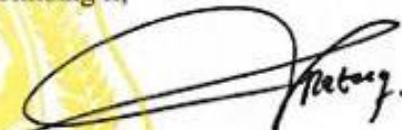
Mengetahui :

Pembimbing I,



H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,



Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR
NIK. 198909132020053001

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



H. Darwis, MA, Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : IMPLEMENTASI *SMART MARITIME DIPLOMACY* INDONESIA
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

N A M A : VIVI USMAN

N I M : E061171009

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa, 25 Januari 2022.

TIM EVALUASI

Ketua : H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Bama Andika Putra, S.IP, MIR



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivi Usman
NIM : E061171009
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**“IMPLEMENTASI *SMART MARITIME DIPLOMACY* INDONESIA DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan ataupun karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain kecuali kutipan dan ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Februari 2022

Yang menyatakan,


Vivi Usman

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran **Allah SWT** yang telah memberi kesempatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menuntaskan penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi *Smart Maritime Diplomacy* Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan” ini. Shalawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada **nabiullah Muhammad SAW** sebagai figur pedoman terbaik bagi seluruh umat manusia yang telah menuntun kita beranjak dari zaman jahiliyah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarannya kepada kedua orang tua, bapak dan ibu penulis **Pak Usman S.Pd.** dan **Ibu Hj. Nurlia** yang dengan sepenuh hati telah memberikan dukungan baik secara finansial dan lisan sehingga menjadi semangat untuk penulis berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran. Tidak lupa penulis haturkan terima kasih kepada kakak-kakak tercinta, **Fian Sutarmi** dan **Veni Usman** sebagai *support system* terbaik setelah kedua orang tua. Tidak lupa pula melalui lembaran ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dari pihak-pihak yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

1. **Ibu Rektor Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A** beserta jajarannya.
2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Armin, M.Si** beserta jajarannya.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Pembimbing I, **H. Darwis, MA, Ph.D** dan Pembimbing II, **Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR.**

Terima kasih atas segala masukan, saran, dan kritikan yang diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. Penulis mendapatkan banyak pengetahuan yang diperoleh selama proses bimbingan dari beliau.

4. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS, **H. Darwis, MA, Ph.D.** Tak lupa pula dosen-dosen dan staff Departemen **Pak Patrice, Alm. Pak Aspi, Pak Adi, Pak Husain, Pak Munjin, Pak Agus, Pak Nasir, Pak Bur, Pak Ishaq, Bu Puspa, Bu Seni, Kak Gego, Kak Aswin, Kak Bama, Kak Aca, Kak Rahma, Kak Dayat, Kak Ita,** dan **Pak Ridho.** Dan terima kasih pula penulis haturkan kepada **Kak Jannah** selaku dosen PA yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
5. Kepada sepupu-sepupu penulis yang selalu mensupport penulis terutama di masa perkuliahan. **Alif**, yang barupi lagi ketemu pas kuliah setelah beberapa tahun dan selalu ada disaat penulis butuh bantuan. **Icca**, adik bongsor yang sudah seperti adik kandung penulis, yang paling sering tanya kapan pulang dan juga selalu ada disaat penulis butuh bantuan. **Mulia**, yang setiap ketemu pasti lebih banyak cerita seputar dunia Kpop. Dan sepupu lainnya yang tidak sempat penulis sebut satu persatu yang juga selalu mensupport penulis hingga saat ini.
6. Teman kecil sejak TK, SD, dan SMP, teman sepermainan penulis hingga saat ini dan yang paling banyak wacananya. **Ardel, Esty, Yayam, Qade, Neni, Fara, Arma, Yuni, Nanda, Runi, Itha, Pany, Dewy, Indah, Enil, Andari, Weny, Sukma, Lisa Ondeng, Dillah, Wana, Elsa, Parah, Atons, Akmal, Arjun, Agil, Akil, Ewing, Torres, Dandi, Mentong, Mamang, Bulla, Taufiq, Syahrullah, Yoko,** dan teman-teman lain yang belum sempat penulis

sebut namanya karena terlalu banyak dan penulis sangat pelupa huhuu. Always thank u guys so much sudah selalu mensupport penulis hingga saat ini.

7. Teman SMA penulis yang masih setia hingga akhir dan kalau kumpul lebih banyak cerita unfaedahnya wkwkk, **Unni, Azza** aka **Rambo, Nurmala, Eisyah, Ramma, Karlina, Emi** dkk, **Sukma Eomma** dkk, **A. Dian** dkk, **A. Aswan** aka **Baymax, Yasmin, Syawal, Dandi Obeng**, dan teman-teman sekelas maupun dari kelas lain yang belum sempat penulis sebut namanya, thank u guys atas segala supportnya untuk penulis.
8. Sobat karib **Korea Utara Club** yang isinya 98 liner kecuali penulis. **Yoleh**, teman sederhana dari Sidrap dong dan selalu baku bawa sejak maba sampai sekarang, yang paling seringka nginap di kosnya wkwkk. **Sarwinda**, yang punya Kendari sebagian dan seringka juga nginap di kosnya, kadang juga ke kosku nginap kalau mau curhat masalah doinya, pokoknya teman curhat yang paling terfavorite ini. **Iung**, kalau masalah Kpop dibahas sudahmi, eonni yang paling care dong ke penulis, partner sempro sampai sidang, pokoknya selalu mengcape sama-sama huhuu.
9. **LIBERTE 2017**, teman-teman seperjuangan penulis selama masa-masa perkuliahan dalam berbagai situasi dan kondisi, mulai dari masa pengkaderan pas maba, kerja tugas sama-sama dan biasanya menghilang pas kerja kelompok, teman cerita di kelas apalagi kalau tidak masuk dosen auto ribut atau nonton drakor dan varshow hahaa. Teman-teman sekelas penulis di **Liberte Ganjil, Ulwi, Putri, Risna, Kiki Kecil, Cini, Alya, Fara, Thama, Pip, Ony, Nita, Ayi, Sita, Cici, Isa, Nisa, Yayang, Agal, Andika, Fadhil,**

Ainul, Miftah, Apro, Emil, Danu, Yafirul, Febri. Dan teman-teman dari kelas **Liberte Genap, Kiki Besar, Kaka Wiwin, Mayang, Wardah, Sugi, Tia, Dela, Safira, Dian, Faiza, Uci, Novi, Egi, Alief, Daus, Dion, Faroq, Rifqi, Rafli, Zufar, Hasbi, Imran, Ucup, Ucil, Wiz, Ari.**

Sebagai akhir dari bagian ini, tentunya skripsi ini juga tidak luput dari kesempurnaan. Maka dari itu, saran dan kritikan diharapkan oleh penulis demi perkembangan ilmu yang tiada habisnya. Semoga kita dapat dipertemukan kembali untuk berdiskusi serta memberi kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya.

Wassalam

Makassar, 12 Januari 2022

Penulis

ABSTRAK

Vivi Usman, E061171009, “Implementasi *Smart Maritime Diplomacy* Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan” dibawah bimbingan H. Darwis, MA, Ph.D selaku pembimbing I dan Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR selaku pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan strategi Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui *Smart Maritime Diplomacy*, serta dampak dari penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui *Smart Maritime Diplomacy*. Metode penulisan yang digunakan yaitu tipe deskriptif yang menjelaskan bentuk dan dampak penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui *Smart Maritime Diplomacy* Indonesia. Teknik pengumpulan datanya yaitu telaah pustaka (*Library Research*) yang bersumber dari data-data yang diperoleh melalui buku, jurnal baik lokal maupun internasional, dokumen, laporan, artikel, surat kabar harian, yang diperoleh dari berbagai media online seperti situs-situs resmi yang memuat atau mendukung seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode penulisan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam penyelesaian konflik di Laut China Selatan dengan melalui pendekatan *Smart Maritime Diplomacy* sedikit banyaknya telah berhasil meredam kondisi yang memanas di wilayah konflik tersebut. Indonesia menggunakan pendekatan *Smart Maritime Diplomacy* yang merupakan kombinasi antara *hard diplomacy* dan *soft diplomacy* sebagai upaya penyelesaian konflik di Laut China Selatan. Oleh karena itu, Indonesia melakukan pendekatan yang lebih keras dan tegas yaitu dengan melalui diplomasi maritim koersif yang merupakan upaya Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritimnya dari segala bentuk ancaman, terutama terkait klaim China di wilayah Laut China Selatan yang bersinggungan dengan wilayah ZEE Indonesia, yaitu Kepulauan Natuna. Disamping melakukan pendekatan yang lebih keras dan tegas, maka perlu pula ditunjang dengan pendekatan yang lebih lunak dengan melakukan upaya-upaya penyelesaian melalui diplomasi maritim kooperatif dan diplomasi maritim persuasif, dimana Indonesia dengan ini secara aktif terus mendorong dan melakukan kerja sama, serta melakukan berbagai perundingan dengan negara-negara lain untuk meredakan ketegangan di wilayah Laut China Selatan dan untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan.

Kata Kunci: *Smart Maritime Diplomacy*, Konflik Laut China Selatan, Kepulauan Natuna, ASEAN.

ABSTRACT

Vivi Usman, E061171009, "Implementation of Indonesia's Smart Maritime Diplomacy in South China Sea Conflict Resolution" at Hasanuddin University's Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, under the supervision of H. Darwis, MA, Ph.D as supervisor I and Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR as supervisor II.

This study aims to determine Indonesia's form and strategy for resolving the South China Sea conflict through Smart Maritime Diplomacy, as well as the impact of resolving the South China Sea conflict through Smart Maritime Diplomacy. The writing method used is descriptive, which explains the form and impact of resolving the South China Sea conflict through Indonesia's Smart Maritime Diplomacy. The data collection technique is library research, which is sourced from data obtained from books, journals, both local and international, documents, reports, articles, and daily newspapers, obtained from various online media such as official websites containing or supporting all the information needed in this research. Meanwhile, for data analysis, the author uses qualitative analysis techniques with deductive writing.

The results show that the efforts that have been made by Indonesia in resolving the South China Sea conflict through the Smart Maritime Diplomacy approach have more or less succeeded in reducing the heated conditions in the conflict area. In order to resolve disputes in the South China Sea, Indonesia employs the "Smart Maritime Diplomacy" approach, which is a combination of hard diplomacy and soft diplomacy. Therefore, Indonesia takes a tougher and firmer approach, namely through coercive maritime diplomacy, which is Indonesia's way of asserting and safeguarding its maritime sovereignty from all forms of threats, especially regarding China's claims in the South China Sea area that intersects with Indonesia's EEZ area, namely the Natuna Islands. In addition to adopting a tougher and firmer approach, it is also necessary to support a softer approach by making efforts to resolve it through cooperative maritime diplomacy and persuasive maritime diplomacy, which Indonesia is hereby actively encouraging and cooperating with other countries to ease tensions in the South China Sea region and to maintain security stability in the region.

Keywords: Smart Maritime Diplomacy, South China Sea Conflict, Natuna Islands, ASEAN.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iiiv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penulisan	18
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Kompleksitas Keamanan Kawasan (<i>Regional Security Complex</i>)	20
B. <i>Smart Maritime Diplomacy</i>	29
C. Penelitian Terdahulu	41
BAB III.....	48
DIPLOMASI INDONESIA DAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN	48
A. Sejarah dan Dinamika Laut China Selatan.....	48
B. Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan	54
C. Kepentingan Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan	61
D. Dinamika Diplomasi Maritim Indonesia dan Konflik Laut China Selatan (Era 1990 – 2014).....	64

BAB IV	73
BENTUK DAN DAMPAK PENYELESAIAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN MELALUI <i>SMART MARITIME DIPLOMACY</i> INDONESIA	73
A. Bentuk dan Strategi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Melalui <i>Smart Maritime Diplomacy</i>	75
B. Dampak Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Melalui <i>Smart Maritime Diplomacy</i>	89
BAB V.....	110
PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	17
Bagan 1.2 Kerangka Konsep Penelitian.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	46
Tabel 1.2 <i>Smart Maritime Diplomacy</i>	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa laut menjadi sumber kehidupan bagi suatu negara terutama untuk laut yang menjadi batas maritim antarnegara. Begitu pula dengan Laut China Selatan yang berbatasan langsung dengan beberapa negara di kawasan, seperti China, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, Thailand, Indonesia, dan Singapura. Selama berabad-abad, wilayah ini menjadi penting bagi kelangsungan ekonomi negara-negara Asia di kawasan tersebut, bahkan wilayah ini juga penting bagi negara-negara yang bukan negara pengklaim (*non-claimant states*), seperti Korea Selatan dan Jepang, dimana kedua negara tersebut tidak berbatasan langsung dengan wilayah Laut China Selatan.

Meskipun Laut China Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi hal itu justru menjadi faktor penyebab terjadinya konflik dan ketegangan di kawasan karena adanya klaim yang tumpang tindih oleh beberapa negara di wilayah tersebut. Ketegangan di wilayah tersebut diperparah dengan klaim sepihak China terhadap sebagian besar teritorial di wilayah tersebut. Sehingga, klaim sepihak China itu kemudian bersinggungan dengan wilayah perairan sejumlah negara, seperti Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Vietnam. Sikap China yang dianggap cukup agresif ini akhirnya mengakibatkan konflik di Laut China Selatan menjadi ancaman

terhadap stabilitas keamanan di kawasan. Oleh karena itu, konflik di Laut China Selatan pada akhirnya menjadi persoalan yang cukup kompleks.

Untuk mengantisipasi semakin meningkatnya konflik di Laut China Selatan, maka negara-negara anggota ASEAN dan China menandatangani *Declaration of Conduct on the South China Sea* (DOC), yang mengharuskan semua pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan. Selain itu, penting pula bagi semua negara pengklaim menahan diri untuk tidak menduduki pulau-pulau tak berpenghuni, terumbu karang dan perairan dangkal di Laut China Selatan. Namun, beberapa tahun setelah DOC ditandatangani dan perselisihan mulai mereda, persoalan itu justru berimbas ke Indonesia sejak tahun 2009.

Pada tahun 2009, China mengirim sebuah catatan lisan ke Sekretaris Jenderal PBB terkait “Sembilan Garis Putus-Putus” (*nine-dashed line*) yang secara resmi telah digunakan untuk menggambarkan klaim China di Laut China Selatan. Awalnya peta ini dibuat oleh para diplomat Nasionalis China di tahun 1947 yang mencantumkan garis putus-putus yang mengelilingi sebagian besar wilayah Laut China Selatan. Salah satu dari garis putus-putus tersebut saling menyilang dengan batas utara dari wilayah ZEE Indonesia di bagian utara Kepulauan Natuna (Connelly, 2017).

Kepulauan Natuna sendiri terdiri dari kumpulan 272 pulau yang terletak di ujung selatan Laut China Selatan di Provinsi Riau, hampir 1.250 mil dari daratan China. Selain lokasinya yang strategis sebagai pintu gerbang maritim ke negara kepulauan dan kedekatannya dengan jalur penting yang membawa sebagian besar perdagangan Indonesia, Natuna juga terletak diantara banyak daerah

penangkapan ikan dan ladang gas terbesar yang dapat dipulihkan di dunia (Center For Strategic & International Studies, 2014).

Para petinggi Indonesia berulang kali telah meminta China untuk memperjelas klaim *nine-dashed line* di Laut China Selatan. Hal itu dilakukan setelah Indonesia mengetahui untuk pertama kalinya pada tahun 1983 bahwa klaim tersebut mencakup ZEE Indonesia. Sehingga pada bulan Juli 2010, Indonesia menulis dalam catatan verbal kepada Sekretaris Jenderal PBB bahwa *nine-dashed line* itu jelas-jelas tidak memiliki basis hukum internasional dan menimbulkan risiko pembalikan terhadap UNCLOS 1982 (Connelly, 2017). Namun tidak dapat dipungkiri, dalam beberapa tahun terakhir justru terjadi insiden konfrontasi berulang-ulang di laut antara Indonesia dengan China.

Indonesia sejak awal memang bukan negara pengklaim dan tidak berselisih mengenai kedaulatan atas wilayah apapun. Akan tetapi, sejak 2010 China telah mengklaim keseluruhan teritorial di Laut China Selatan secara sepihak. Dimana dalam klaim sepihak China tersebut bersinggungan dengan perairan ZEE Indonesia, yaitu wilayah di utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Indonesia.go.id, 2020). Oleh karena itu, klaim secara sepihak oleh China dalam *nine-dashed line* itulah yang menjadi persoalan bagi Indonesia.

Kekhawatiran Jakarta perihal niat China yang sudah meningkat terhadap ZEE Indonesia di Natuna telah muncul semenjak 2009, ketika kapal penangkap ikan China muncul dengan dilindungi oleh kapal penegak hukum China. Kemudian, pada Juni 2009, TNI AL juga menahan 75 nelayan China di delapan kapal yang menangkap ikan secara ilegal di Natuna. Insiden yang lebih serius terjadi di tahun

berikutnya, dimana setidaknya terjadi tiga insiden pada tahun 2010 dan 2013 (Center For Strategic & International Studies, 2014).

Pada tahun 2010, insiden terjadi ketika sebuah kapal AL Indonesia menahan 10 kapal penangkap ikan China di Natuna. Dua kapal penegak hukum China yang bersenjata kemudian tiba dalam beberapa jam, lalu terjadi konfrontasi tegang antara kedua pihak. Di tahun berikutnya, insiden yang terjadi pada Maret 2013 juga melibatkan kapal penegak hukum maritim Indonesia dan China (Center For Strategic & International Studies, 2014). Kapal-kapal Indonesia yang berupaya untuk menahan kapal-kapal penangkap ikan China tersebut diperintahkan oleh kapal-kapal penegak hukum China untuk melepaskan kapal-kapal China yang ditahan oleh Indonesia. Pasalnya, kapal-kapal China itu diketahui terus melakukan *illegal fishing* di ZEE Indonesia di sekitar perairan Natuna. Dan pada bulan-bulan terakhir, kapal-kapal China itu sudah berkeliaran dengan disertai kapal pengawas pantai China (*coast guard*) (Connelly, 2017).

Sama halnya dengan insiden sebelumnya di tahun 2010 dan 2013, ada tiga insiden konfrontasi laut antara Indonesia dan China yang terjadi di tahun 2016. Seperti yang terjadi pada 19 Maret 2016, dimana kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menangkap kapal pukat China yang melakukan *illegal fishing* di ZEE Indonesia. Kemudian, insiden kedua yang terjadi pada 27 Mei 2016, ketika kapal Fregat Angkatan Laut Indonesia KRI Oswald Siahaan memergoki sebuah kapal pukat China di lokasi serupa dengan sebelumnya. Bahkan insiden serupa kembali terjadi pada 17 Juni 2016, dimana pada saat itu sebuah kapal korvet kecil AL Indonesia, KRI Imam Bonjol, menghadapi setidaknya tujuh kapal nelayan dan dua kapal pengawas pantai China yang jauh

lebih besar berada di ZEE Indonesia dekat Kepulauan Natuna yang terpencil. Insiden tersebut merupakan kasus terakhir dari serangkaian pertemuan di wilayah tersebut selama tahun 2016 antara pihak berwenang Indonesia dengan kapal-kapal milik China (Connelly, 2017).

Berselang tiga tahun kemudian, insiden seperti di tahun sebelumnya kembali terjadi pada 19 Maret 2019 ketika kapal nelayan dari China masuk ke perairan Natuna. Kapal patroli Indonesia yang berjaga saat itu sempat mengejar, namun kapal nelayan tersebut melarikan diri dengan dikawal oleh *coast guard* China. Kemudian, dalam kurun waktu Desember 2019 hingga Januari 2020, terdapat sejumlah kapal nelayan milik China yang kembali memasuki perairan Natuna dan dikawal oleh *coast guard* China. Insiden serupa lagi-lagi terjadi pada 12 September 2020, dimana Bakamla mendeteksi adanya kapal *coast guard* China yang kembali masuk ke wilayah perairan Natuna saat Bakamla sedang menggelar Operasi Cegah Tangkal di Zona Maritim Barat yang mencakup perairan Natuna pada tahun 2020 (Yuniar, 2020).

Sikap paling baik yang dapat dilakukan oleh Indonesia ialah mengabaikan adanya klaim oleh China, terutama yang terkait dengan Natuna. Maka dari itu, Indonesia menyatakan tidak ikut menggugat dalam sengketa Laut China Selatan dan Indonesia tetap memainkan peran sebagai *honest broker* dalam berbagai upaya penyelesaian untuk meredakan ketegangan di wilayah sengketa dengan melalui jalur diplomasi. Sehingga, Indonesia melalui diplomasi maritimnya menggunakan kombinasi antara *hard power* dan *soft power* dalam diplomasi yang kemudian disebut sebagai *Smart Maritime Diplomacy* (Rijal, 2013).

Indonesia melakukan upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan dengan menggunakan *Smart Maritime Diplomacy* sebagai pendekatan diplomasi maritimnya. *Smart Diplomacy* ini diartikan sebagai kombinasi dari strategi *hard power* dan *soft power* dalam diplomasi, dengan mengacu pada kebutuhan kekuatan militer yang dikombinasikan dengan *partnership*, serta aliansi sebagai penyeimbangannya. Menurut Najamuddin Khairur Rijal, Indonesia dalam diplomasi maritimnya menggunakan tiga bentuk diplomasi maritim yang diperkenalkan oleh Miere, yaitu diplomasi maritim kooperatif, persuasif, dan koersif yang dapat dikategorikan dalam strategi baik itu *hard power* maupun *soft power* dalam diplomasi (Rijal, 2013).

Co-operative Maritime Diplomacy merupakan salah satu bentuk diplomasi maritim dengan cara melalui kerja sama untuk menyelesaikan berbagai masalah dan juga dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti program pendidikan, pertukaran personel, kunjungan (*Port Calls*), maupun dapat melalui latihan dan pelatihan gabungan (*Joint Exercises and Trainings*). Kemudian, *Persuasive Maritime Diplomacy* merupakan diplomasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengakuan terhadap kekuatan nasional maupun kekuatan maritim suatu negara dan membangun prestise negara di dunia internasional yang dapat dilakukan dengan cara seperti '*showing the flag*'. Dan *Coercive Maritime Diplomacy* merupakan salah satu bentuk diplomasi maritim yang bersifat memaksa dan mengancam dengan menggunakan kekuatan militer, dimana Angkatan Laut/AL digunakan oleh suatu negara untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di perairan.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Mengingat pembahasan mengenai konflik Laut China Selatan sangat luas, maka pembahasan dalam tulisan ini akan berfokus pada konteks penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui *Smart Maritime Diplomacy* Indonesia pada masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini penulis akan membatasi implementasi bentuk penyelesaian dan dampak penyelesaian melalui *Smart Maritime Diplomacy* dalam kurun waktu 2014-2021.

Penulis membatasi pada tahun tersebut karena bentuk penyelesaian konflik Laut China Selatan dibawah Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dapat dikatakan sedikit berbeda dengan bentuk penyelesaian pada kepemimpinan sebelumnya. Dapat dilihat pada kepemimpinan sebelumnya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pendekatan sebagai pemain aktif yang mencari penyelesaian damai dengan lebih luas yang kemudian beralih menjadi pendekatan yang lebih berfokus pada melindungi kepentingan sendiri terutama yang menyangkut masalah perairan Natuna pada masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga saat ini.

Adapun negara-negara yang terlibat dalam konflik wilayah Laut China Selatan adalah China, Taiwan, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Meskipun Indonesia bukan negara pengklaim di Laut China Selatan, tetapi karena adanya klaim sepihak China terhadap perairan Natuna yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, sehingga Indonesia mengambil langkah dengan turut berperan dalam penyelesaian konflik di wilayah tersebut. Maka dari itu, Indonesia lebih memilih sebagai negara penengah yang tidak

berpihak (*honest broker*) dan telah memainkan peran dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan sejak tahun 1990-an.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan strategi Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui *Smart Maritime Diplomacy*?
2. Bagaimana dampak dari penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui *Smart Maritime Diplomacy*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk dan strategi Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui *Smart Maritime Diplomacy*.
- b. Untuk mengetahui dampak dari penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui *Smart Maritime Diplomacy*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di masa yang akan datang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk bidang kajian yang sama.

D. Kerangka Konseptual

1. Kompleksitas Keamanan Kawasan (*Regional Security Complex*)

Keamanan kawasan merupakan suatu kondisi yang terbentuk dari pola hubungan persahabatan (*amity*) dan pola hubungan permusuhan (*enmity*) sebagai dampak dari persetujuan di masa lalu, geopolitik, dan interaksi antarnegara dalam suatu area yang terbatas. Barry Buzan dan Ole Waever mendefinisikan *Regional Security Complex* sebagai sekelompok negara dalam suatu kawasan, dimana fokus utama dari aspek keamanan berhubungan erat dan terikat antara satu negara dengan negara lainnya (interdependensi keamanan). Interdependensi keamanan dalam suatu kawasan akan selalu terjadi sehingga keamanan menjadi semakin kompleks (Syahrin M. N., 2018).

Regional Security Complex (RSC) merupakan kerangka konsep yang dicetuskan oleh Barry Buzan. Konsep RSC untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Barry Buzan melalui bukunya yang terbit pada tahun 1983 dengan judul "*People, State, and Fear; The National Security Problem in International Relations*" (Daniealdi, 2019). Menurut Buzan dan Waever, ada empat struktur utama yang menjadi dasar terciptanya RSC, yaitu kedekatan geografis, anarkisme kawasan, polaritas kekuatan atau *distribution of power*, dan konstruksi sosial berupa *amity* dan *enmity* (Syahrin M. N., 2018).

Struktur utama yang pertama dalam RSC adalah kedekatan geografis yang merupakan tempat dimana hubungan keamanan diantara negara terbentuk dan saling memiliki keterikatan. Dalam hal ini, rasa tidak aman

diciptakan oleh ancaman yang berasal dari negara yang berdekatan, bukan dari negara yang memiliki jarak yang lebih jauh (Noviryani, 2016). Dimana dalam suatu wilayah terdapat interaksi keamanan antara satu negara dengan keamanan negara lainnya. Sebagian besar masalah keamanan tidak berasal dari jarak yang jauh, namun ancaman dalam lingkungan terdekat suatu negara kemungkinan besar yang paling kuat dirasakan. Maka dari itu, karena adanya faktor kedekatan jarak, yang kemudian mengakibatkan seringkali terjadinya saling ketergantungan keamanan yang intens dalam RSC.

Selanjutnya, struktur utama yang kedua dalam RSC adalah anarkisme kawasan. Struktur kawasan yang anarkis ini menyebabkan hubungan keamanan antarnegara dalam suatu kawasan menjadi tidak seimbang dan selalu dipenuhi dengan keraguan dan ketegangan. Ketika suatu negara tidak dapat mengikuti dinamika keseimbangan tersebut, maka negara itu akan rentan menjadi sasaran hegemoni negara lain (Syahrin M. N., 2018). Dalam struktur kawasan yang anarki, apabila terjadi sebuah konflik antarnegara biasanya tidak ada otoritas yang berwenang dalam proses penyelesaian secara damai.

Kemudian, struktur utama yang ketiga dalam RSC adalah konstruksi sosial berupa pola *amity* (persahabatan) dan *enmity* (permusuhan). Maksud dari pola *amity* yaitu hubungan antarnegara yang terjalin berdasarkan dari persahabatan dan saling melindungi satu sama lain. Sementara maksud dari pola *enmity* yaitu hubungan antarnegara yang terjalin berdasarkan adanya kecurigaan dan rasa takut satu sama lain.

Dan terakhir, struktur utama yang keempat dalam RSC adalah *distribution of power* yang dapat dipahami dari gambaran keseluruhan distribusi kekuasaan diantara kekuatan-kekuatan global. Kekuatan global dan dinamika regional dari RSC disebut sebagai mekanisme penetrasi atau penerobosan. Penetrasi terjadi ketika keberpihakan dari kekuatan luar yang masuk dalam suatu regional (Setiawan, 2017). Keterlibatan pihak eksternal dipandang sebagai bentuk masuknya negara luar ke dalam suatu kawasan ketika terjadi sebuah konflik. Selain itu, pihak eksternal juga dapat membangun kerja sama atau aliansi dengan satu atau beberapa negara di kawasan tersebut (Syahrin M. N., 2018).

Berdasarkan dari konsep diatas, maka dalam kasus Laut China Selatan, konsep *Regional Security Complex* ini akan digunakan untuk melihat bagaimana bentuk kompleksitas keamanan di kawasan Laut China Selatan. Dimana dalam membedah kasus terkait Laut China Selatan akan digunakan empat struktur utama yang menjadi dasar terciptanya *Regional Security Complex*, diantaranya kedekatan geografis, anarkisme kawasan, polaritas kekuatan (*distribution of power*), dan pola *amity* dan *enmity*.

2. *Smart Maritime Diplomacy*

Maritime diplomacy merupakan salah satu bentuk diplomasi yang menggunakan kekuatan maritim sebagai instrumen dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Christian Le Miere, diplomasi maritim tidak hanya terbatas pada penggunaan diplomasi untuk menyelesaikan konflik dan ketegangan antarnegara yang terkait dengan isu maritim melalui penyusunan instrumen hukum internasional. Namun, diplomasi maritim juga diartikan sebagai penggunaan aset atau sumber daya maritim untuk mengatur hubungan antarnegara (Sigit, 2019).

Diplomasi maritim juga tidak hanya melibatkan aktor-aktor seperti diplomat, tetapi juga melibatkan aktor-aktor lain, seperti angkatan laut, penjaga pantai (*coast guard*), dan pasukan militer lainnya, yang juga merupakan agen utama dan representasi dari negara. Selain itu, adapula aktor lain yang terlibat dalam diplomasi maritim seperti analis dan akademisi yang mengkaji mengenai perkembangan yang sedang terjadi terutama mengenai isu-isu hubungan internasional.

Maritime Diplomacy dapat secara ringkas dibagi menjadi diplomasi maritim kooperatif, persuasif, dan koersif (Miere, *Maritime Diplomacy in the 21st Century*, 2014). Ketiga bentuk diplomasi maritim yang dimaksud lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

1. Diplomasi Maritim Kooperatif (*Co-operative Maritime Diplomacy*) yaitu salah satu bentuk diplomasi maritim yang dilakukan dengan cara melalui kerja sama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan khususnya yang berkaitan dengan aspek maritim. Selain itu,

diplomasi maritim kooperatif ini juga dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti program pendidikan, pertukaran personel, kunjungan (*Port Calls*), maupun dapat melalui latihan dan pelatihan gabungan (*Joint Exercises and Trainings*).

2. Diplomasi maritim persuasif (*Persuasive Maritime Diplomacy*) yaitu diplomasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengakuan terhadap kekuatan nasional maupun kekuatan maritim suatu negara dan membangun prestise negara di dunia internasional. Diplomasi maritim persuasif ini tidak berarti dimaksudkan untuk mempengaruhi ataupun menakut-nakuti negara lain. Akan tetapi, diplomasi ini hanya bertujuan untuk membujuk negara lain bahwa angkatan laut ataupun kekuatan maritim negara tersebut ada dan efektif. Diplomasi maritime persuasif ini dapat dilakukan dengan melalui cara seperti '*showing the flag*', dimana kapal-kapal angkatan laut digunakan untuk memberi sinyal kehadiran dan kemampuan suatu negara tanpa harus berupaya mempengaruhi kebijakan negara lain.
3. *Coercive Maritime Diplomacy* ini salah satu bentuk diplomasi maritim yang bersifat memaksa dan mengancam dengan menggunakan kekuatan militer, seperti AL yang digunakan oleh suatu negara untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di perairan. Personel militer dalam hal ini menjadi representasi negara yang akan melakukan penembakan, penyergapan, dan penyerangan terhadap pihak yang telah melakukan pelanggaran di teritorial laut negara tersebut.

Dalam *Maritime Diplomacy* Indonesia digunakan satu istilah yaitu *Smart Diplomacy*. *Smart Diplomacy* ini dapat diartikan sebagai kombinasi dari strategi *hard power* dan *soft power* dalam diplomasi, dengan mengacu pada kebutuhan kekuatan militer yang dikombinasikan dengan *partnership*, serta aliansi sebagai penyeimbangannya. Karena jika hanya menitikberatkan pada salah satu diplomasi saja, maka tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dunia internasional.

Joseph Nye, mengemukakan bahwa strategi yang paling efektif pada kebijakan luar negeri suatu negara saat ini adalah dengan mengkombinasikan antara sumber-sumber *hard diplomacy* dan *soft diplomacy*. Dr. Chester A. Crocker, pengamat politik luar negeri AS, menjelaskan bahwa *smart power* adalah strategi yang mencakup diplomasi, persuasif, *capacity building* dan penggunaan kekuatan militer untuk mendapatkan justifikasi politik dan sosial (Arfan, *Airpower Diplomacy Sebagai Bagian dari Smart Power Bagi Pencapaian Tujuan Nasional*, 2018).

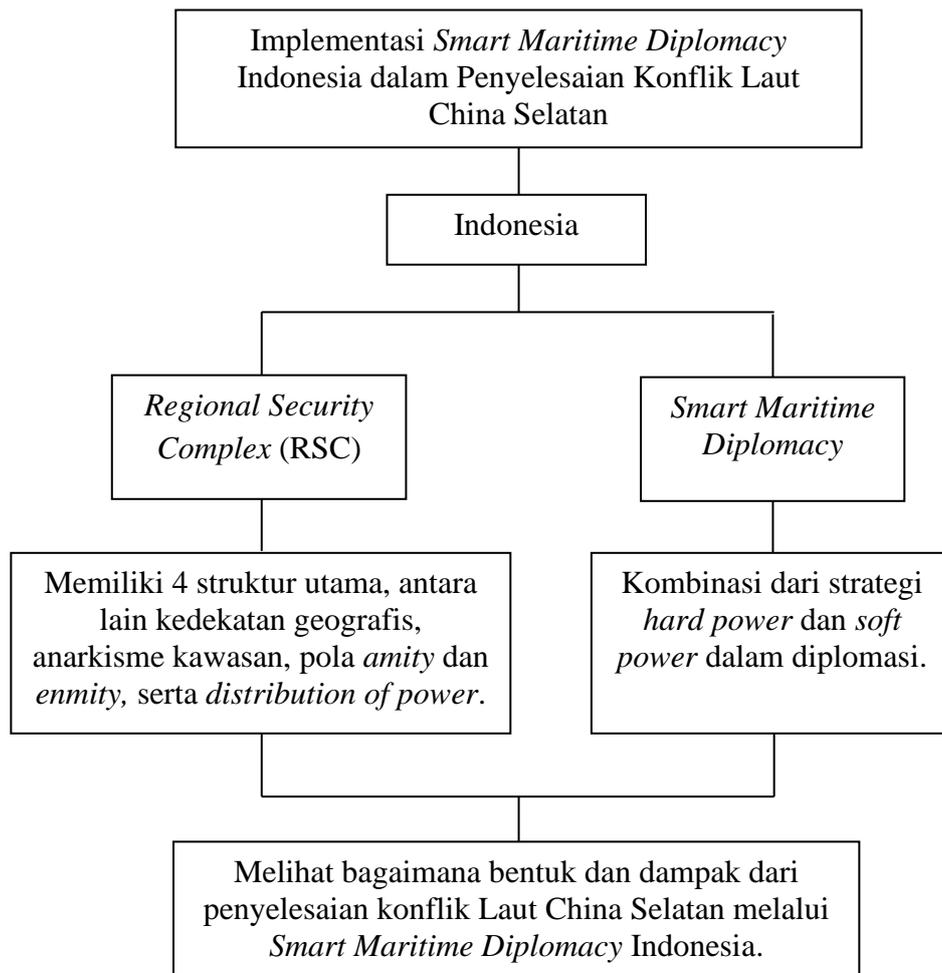
Berdasarkan dari kedua definisi tersebut, maka dapat dilihat bahwa *smart diplomacy* muncul disebabkan oleh anggapan bahwa jika strategi diplomasi hanya berjalan sendirian tanpa berkesinambungan satu sama lain, disitulah diplomasi tidak akan berjalan efektif. Sehingga diperlukan kombinasi strategi yang mampu mengayomi satu sama lain, yaitu gabungan dari *hard power* dan *soft power* dalam diplomasi, yang pada akhirnya akan mendukung bagaimana kebijakan luar negeri suatu negara dapat dilaksanakan.

Melihat dari konsep diatas, maka Najamuddin Khairur Rijal menjelaskan bahwa Indonesia dalam diplomasi maritimnya menggunakan tiga bentuk

diplomasi maritim yang diperkenalkan oleh Miere, yaitu diplomasi maritim kooperatif (*Co-operative Maritime Diplomacy*), diplomasi maritim persuasif (*Persuasive Maritime Diplomacy*), dan diplomasi maritim koersif (*Coercive Maritime Diplomacy*) yang dapat dikategorikan dalam strategi baik itu *hard power* maupun *soft power* dalam diplomasi (Rijal, 2013). Dalam *Co-operative Maritime Diplomacy*, Indonesia telah melakukan beberapa bentuk kerja sama salah satunya pada sektor keamanan seperti latihan bersama, *joint research*, dan *transfer of knowledge*. Dalam *Persuasive Maritime Diplomacy*, Indonesia dengan melalui mekanisme ASEAN telah secara aktif mendorong implementasi DOC (*Declaration on Conduct of the Parties*) dan penyusunan COC (*Code of Conduct*). Dalam *Coercive Maritime Diplomacy*, salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan adalah dengan memperkuat kehadiran militer di Natuna serta rutin melakukan patroli laut di perairan Natuna.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan konsep Kompleksitas Keamanan Kawasan (*Regional Security Complex*) dan *Smart Maritime Diplomacy*.

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Source: Diolah dari berbagai sumber.

Dalam bagan tersebut, penulis menekankan bahwa konsep *Regional Security Complex* (RSC) merupakan konsep yang digunakan untuk melihat bagaimana bentuk kompleksitas keamanan di kawasan Laut China Selatan. Selain itu, konsep *Smart Maritime Diplomacy* juga digunakan sebagai pendekatan dalam Diplomasi Maritim Indonesia untuk penyelesaian konflik di Laut China Selatan.

E. Metode Penulisan

1. Tipe Penulisan

Tipe penulisan yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif. Tipe penulisan yang digunakan ini sesuai dengan rumusan masalah yang diusulkan oleh penulis. Penulis akan menganalisis tentang bagaimana bentuk dan dampak penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui *Smart Maritime Diplomacy* Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode telaah pustaka (*Library Research*) untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Data-data diperoleh melalui buku, jurnal baik lokal maupun internasional, dokumen, laporan, artikel, surat kabar harian, yang diperoleh dari berbagai media online seperti situs-situs resmi yang memuat atau mendukung seluruh informasi yang dibutuhkan untuk penulisan ini. Adapun sumber data yang diperoleh penulis dari laporan yang berasal dari situs resmi, seperti Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri China, Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia, dan lain-lain.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data telaah literatur berasal dari *Electronic Book* (E-Book), jurnal-jurnal, artikel, *report* serta situs-situs internet lainnya yang terpercaya. Adapun data yang diperoleh ialah data yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis tentang Implementasi *Smart*

Maritime Diplomacy Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Dengan kata lain, data yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur berkaitan dengan bentuk dan dampak penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui *Smart Maritime Diplomacy* Indonesia.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif, yaitu dengan menjelaskan secara umum masalah yang diteliti dengan menguraikan fakta-fakta, kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menjelaskan hasil analisis. Penulis memaparkan secara umum terkait upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan dan memaparkan dinamika Diplomasi Maritim Indonesia dan konflik Laut China Selatan, serta memaparkan bentuk dan dampak penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui *Smart Maritime Diplomacy* Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kompleksitas Keamanan Kawasan (*Regional Security Complex*)

Dunia telah mengalami banyak perubahan pasca Perang Dingin, tidak hanya secara praktis tetapi juga dalam ranah teoritis. Salah satu perubahan paradigma yang terjadi adalah pada pemahaman tradisional tentang keamanan (*security*). Dalam hal ini, Christopher Rahman menunjukkan bahwa perdebatan teoritis tentang keamanan dalam hubungan internasional yang telah berkembang menjadi sub-disiplin *security studies*, dapat ditelusuri kembali ke awal 1980-an, pada puncak Perang Dingin. Pemahaman ini hanya berkembang selama Perang Dingin dari definisi aslinya tentang keamanan sebagai strategi militer (Setiawan, 2017).

Pada akhir Perang Dunia II, keamanan berarti mengelola kawasan strategis seperti pembagian Berlin, Jerman. Konsep keamanan pasca Perang Dingin berkembang dari persoalan militer semata menjadi keamanan dalam artian tidak hanya diakui di tingkat global, regional, atau negara, tetapi juga di tingkat individu manusia. Barry Buzan mengatakan konsep keamanan hanya dapat dipahami dengan mengintegrasikan tingkat analisis dan aspek keamanan yang dibagi menjadi tingkat individu, nasional, dan internasional untuk keamanan regional dan sistem yang lebih luas (Setiawan, 2017).

Keamanan kawasan merupakan salah satu fokus keamanan yang semakin populer pasca Perang Dingin. Berakhirnya bipolaritas dalam politik internasional telah beralih fokus dari keamanan global menjadi keamanan kawasan. Kompleksitas keamanan kawasan-kawasan di dunia memberikan alternatif

pendekatan keamanan tradisional menjadi pendekatan kawasan. Pendekatan keamanan kawasan dengan meninjau kompleksitasnya ditawarkan oleh Barry Buzan dan Ole Waever melalui *Regional Security Complex* (RSC) (Noviryani, 2016).

Meninjau pada tulisan Mely Noviryani yang berjudul Natuna dan Transformasi Eksternal *Regional Security Supercomplexes* Laut China Selatan, dimana dalam RSC, kawasan didefinisikan sebagai:

“a distinct and significant subsystem of security relations exist[ing] among a set of states whose fate is that they have been locked into geographical proximity with each other.” (Noviryani, 2016).

Berdasarkan dari kutipan diatas, dimana Barry Buzan dan Ole Waever melalui RSC yang mendefinisikan kawasan sebagai subsistem hubungan keamanan yang berbeda dan signifikan yang ada diantara sekelompok negara yang wilayahnya memiliki kedekatan geografis satu sama lain.

Regional Security Complex (RSC) merupakan kerangka konsep yang dicetuskan oleh Barry Buzan. Konsep RSC untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Barry Buzan melalui bukunya yang terbit pada tahun 1983 dengan judul *“People, State, and Fear; The National Security Problem in International Relations“* (Daniealdi, 2019). Dalam tingkat analisis yang digunakan Buzan untuk RSC, disebutkan isu tentang saling ketergantungan keamanan (*security interdependence*), pola persahabatan/permusuhan (*amity/enmity*), subkompleks (*subcomplexes*), spillover domestik (*domestic spillover*), dan wilayah sipil (*civiliational area*) (Setiawan, Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan: Tinjauan atas Analisa Barry Buzan, 2017).

Keamanan kawasan adalah suatu kondisi yang muncul dari pola persahabatan (*amity*) dan permusuhan (*enmity*) sebagai akibat dari persetujuan di masa lalu, geopolitik, dan interaksi antarnegara dalam suatu wilayah terbatas. Barry Buzan dan Ole Waever mendefinisikan *Regional Security Complex (RSC)* sebagai sebuah kelompok negara dalam suatu kawasan tertentu, dimana fokus utama dari aspek keamanan berhubungan erat dan terikat antara satu negara dengan negara lainnya (interdependensi keamanan). Interdependensi keamanan dalam suatu kawasan akan selalu terjadi sehingga keamanan menjadi semakin kompleks (Syahrin M. N., 2018).

Meninjau pada tulisan Asep Setiawan yang berjudul *Keamanan Maritim di Laut China Selatan: Tinjauan atas Analisis Barry Buzan*, dimana pengertian tambahan mengenai RSC disampaikan Ole Waever yang dikutip Julius diartikan sebagai:

“a set of units whose major processes of securitization, de-securitization or both are so interlinked that security problems cannot reasonably be analyzed or resolved apart from one another.” (Setiawan, 2017).

Berdasarkan dari kutipan diatas, dimana Barry Buzan dan Ole Waever berpendapat bahwa region bukan hanya berarti teritori saja, tetapi juga merupakan konsep kawasan dimana proses sekuritisasi, desekuritisasi dan interaksi negara-negara didalamnya saling terkait dan saling berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, sulit untuk menganalisis dan memecahkan masalah keamanan negara-negara dalam kawasan tersebut secara terpisah (Syahrin M. N., 2018).

RSC didefinisikan sebagai interpretasi siapa yang sebenarnya mengontrol interaksi keamanan, dan juga sebagai interpretasi siapa yang sebenarnya terlibat

dalam interaksi keamanan. Selain itu, faktor utama dalam definisi kompleksitas ini juga adalah tingginya tingkat ancaman yang dirasakan oleh lebih dari satu negara (Setiawan, 2017). Pembentukan atau struktur RSC adalah upaya untuk memberikan pengaruh dan disisi lain juga merupakan struktur yang anarkis dan hasil dari adanya perimbangan kekuatan serta tekanan yang diakibatkan oleh kedekatan geografis (Setiawan, 2017).

RSC sebagai sebuah konsep dalam studi empiris tentang keamanan regional memiliki empat tingkat analisis yang saling terkait, yaitu analisis di tingkat nasional, hubungan antarnegara dalam suatu kawasan, interaksi regional dengan regional lain yang berdekatan secara geografis, dan peran kekuatan global dalam suatu kawasan (Setiawan, Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan: Tinjauan atas Analisa Barry Buzan, 2017). Menurut Buzan dan Waeber, ada empat struktur utama yang menjadi dasar terciptanya RSC, yaitu kedekatan geografis, anarkisme kawasan, polaritas kekuatan (*distribution of power*), dan konstruksi sosial berupa *amity* dan *enmity* (Syahrin M. N., 2018).

Struktur utama yang pertama dalam RSC adalah kedekatan geografis yang merupakan tempat dimana hubungan keamanan diantara negara terbentuk dan saling memiliki keterikatan. Dalam hal ini, rasa tidak aman diciptakan oleh ancaman yang berasal dari negara yang berdekatan, bukan dari negara yang memiliki jarak yang lebih jauh (Noviryani, 2016). Dalam suatu wilayah terjadi interaksi antara keamanan satu negara dengan keamanan negara lain. Sebagian besar masalah keamanan tidak berasal dari jarak yang jauh, namun ancaman dalam lingkungan terdekat suatu negara kemungkinan besar yang paling kuat dirasakan. Maka dari itu, karena adanya faktor kedekatan jarak, yang kemudian

mengakibatkan seringkali terjadinya saling ketergantungan keamanan yang intens dalam RSC.

Dalam kasus Laut China Selatan yang didasarkan pada kerangka analisis Buzan, terdapat subkompleksitas di kawasan yang membentuk kompleksitas keamanan kawasan, baik bagi kawasan Asia Timur yaitu China dan Taiwan maupun bagi kawasan Asia Tenggara yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Maka dari itu, dapat dilihat dalam kasus ini dimana semua negara *claimant* memiliki kedekatan geografis di kawasan yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan (Noviryani, 2016).

Selanjutnya, struktur utama yang kedua dalam RSC adalah anarkisme kawasan. Struktur kawasan yang anarkis menyebabkan hubungan keamanan antarnegara di kawasan menjadi tidak seimbang dan selalu dipenuhi dengan keraguan dan ketegangan. Jika suatu negara tidak dapat mengikuti dinamika keseimbangan tersebut, maka negara itu akan rentan menjadi sasaran hegemoni negara lain (Syahrin M. N., 2018). Dalam struktur kawasan yang anarki, apabila terjadi sebuah konflik antarnegara biasanya tidak ada otoritas yang berwenang dalam proses penyelesaian secara damai.

Dalam kasus Laut China Selatan, dapat dikatakan bahwa konflik terjadi di kawasan tersebut karena pengaruh dari perubahan keamanan regional yang muncul pasca Perang Dingin. Selama Perang Dingin, upaya klaim China atas wilayah-wilayah di perairan Laut China Selatan dibatasi oleh situasi pada saat itu. Namun, hilangnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pasca Perang Dingin mengakibatkan struktur kawasan di Asia Timur dan Asia Tenggara menjadi anarki, sehingga muncul berbagai ancaman baru di kawasan

tersebut. Sementara itu, China juga mulai muncul menjadi pemegang hegemoni dan bertindak semakin agresif terhadap klaimnya di wilayah Laut China Selatan (Darwis, 2019).

Kemudian, struktur utama yang ketiga RSC adalah pola *amity* (persahabatan) dan *enmity* (permusuhan). Istilah *amity* dan *enmity* mengacu pada hubungan antarnegara dalam suatu kawasan yang dapat mewakili spektrum yang beraliansi karena adanya sebuah ancaman (Setiawan, 2017). Maksud dari pola *amity* yaitu hubungan antarnegara yang terjalin berdasarkan dari persahabatan dan saling melindungi satu sama lain. Sementara maksud dari pola *enmity* adalah hubungan antarnegara yang terjalin berdasarkan adanya kecurigaan dan rasa takut satu sama lain.

Meninjau pada tulisan Asep Setiawan yang berjudul Keamanan Maritim di Laut China Selatan: Tinjauan atas Analisis Barry Buzan, dimana pemahaman tentang *amity* dan *enmity* disebut Buzan mengarah pada gagasan *security complex* yaitu sebagai:

“a group of states whose primary security concerns link together sufficiently closely that their national securities cannot realistically be considered apart from one another.” (Setiawan, 2017).

Berdasarkan dari kutipan diatas, dimana RSC melihat bahwa keamanan suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan keamanan negara lain, baik itu dalam lingkup regional maupun dalam lingkup global. Karena kawasan merupakan tempat dimana dinamika keamanan nasional dan global saling terkait dan berinteraksi (Syahrin M. N., 2018). Dalam hal ini kawasan merupakan wilayah yang menjadi fokus dimana para aktor saling berhubungan dan menjadi titik dimana terdapat interaksi keamanan nasional dan keamanan global.

Berdasarkan dari kerangka analisis Buzan dalam RSC, maka dapat dilihat kompleksnya persoalan di Laut China Selatan karena negara-negara yang berseteru dengan China menggunakan pola *amity* untuk mendapatkan dukungan dari negara anggota ASEAN yang lain. Sementara China dalam Forum ASEAN berada pada pola *enmity* untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Internasional.

Pola *amity* dan *enmity* biasanya dibangun berdasarkan pada faktor historis dan faktor sosial budaya, yang kemudian akan mempengaruhi suatu *security complex* dalam tatanan regional (Rahmasari, Perspektif Regional Security Complex Theory dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan Tahun 2010-2013, 2015). Selain itu, dengan adanya bentuk ketergantungan antarnegara baik itu berupa pola *amity* maupun *enmity* dalam RSC akan menyebabkan terjadinya persaingan antarnegara. Dengan kondisi seperti itu, maka akan cenderung muncul aliansi keamanan dan masuknya kekuatan eksternal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa interaksi di Laut China Selatan tidak lagi hanya melibatkan negara-negara di kawasan, tetapi juga telah melibatkan negara dari luar kawasan seperti Amerika Serikat, Australia, India, Inggris, Jepang, Perancis, Rusia, dll.

Dan struktur utama RSC yang terakhir atau keempat yaitu *distribution of power* yang dapat dipahami dari keseluruhan pola distribusi kekuatan antara kekuatan-kekuatan global. Kekuatan global dan dinamika regional RSC disebut sebagai mekanisme penetrasi atau penerobosan. Penetrasi terjadi ketika keberpihakan dari kekuatan luar yang masuk ke dalam suatu regional (Setiawan, 2017). Keterlibatan pihak eksternal dipandang sebagai bentuk masuknya negara luar ke dalam suatu kawasan ketika terjadi sebuah konflik. Selain itu, pihak

eksternal juga dapat membangun kerja sama atau aliansi dengan satu atau beberapa negara di kawasan tersebut (Syahrin M. N., 2018).

Adanya keberpihakan dari luar yang masuk dalam suatu regional ini kemudian dipahami sebagai *distribution of power*. Dalam kasus Laut China Selatan, sebagian negara meminjam kekuatan dari luar kawasan untuk dapat mengimbangi kekuatan China di wilayah tersebut yaitu dengan melibatkan Amerika Serikat. Ini dapat dilihat ketika China membangun pangkalan udara baru di wilayah yang juga di klaim oleh Filipina. Sebagai tanggapan, Filipina sengaja mengundang Amerika Serikat untuk melakukan latihan bersama di kawasan itu.

Bahkan, Amerika Serikat mengatakan bahwa kehadirannya di Laut China Selatan hanya sebagai upaya untuk melindungi *freedom of navigation* di perairan internasional, menjaga perdamaian dan mengurangi risiko konflik di kawasan, serta tidak mendukung pihak manapun dalam konflik tersebut. Akan tetapi, upaya tersebut juga diikuti dengan berbagai peningkatan aktivitas kerja sama dengan negara pengklaim. Aktivitas itu dapat dilihat ketika kunjungan Menlu AS, Hillary Clinton, ke Filipina pada tahun 2011 untuk menekankan kembali kerja sama militer antara kedua negara dengan penandatanganan Deklarasi Manila yang diadakan di atas kapal USS Fitzgerald, sekaligus juga untuk memperingati 60 tahun kerja sama pertahanan AS – Filipina. Selain dengan Filipina, Amerika Serikat juga menjalin kerja sama militer dengan Vietnam (Agus Haryanto, 2016).

Lebih lanjut, RSC ini juga dapat bersifat *standard* maupun *centered*. Maksud dari *standard* mengacu pada partisipasi dua kekuatan besar dengan agenda

keamanan, sedangkan *centered* mengacu pada partisipasi kekuatan besar atau negara adidaya dengan sejumlah negara yang lebih kecil. Dalam pola *standard*, RSC didominasi oleh anarki, sedangkan dalam pola *centered* negara dengan kekuatan besar yang mendominasi interaksi keamanan (Setiawan, 2017). Dengan munculnya kehadiran Amerika Serikat untuk mengimbangi kekuatan China di Laut China Selatan ini juga telah mengubah sifat *regional security* di Laut China Selatan dari pola *standard* menjadi *centered* dalam RSC.

Selain itu, RSC ini juga melihat bahwa keamanan suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan keamanan negara lain, baik itu dalam lingkup regional maupun dalam lingkup global. Karena kawasan merupakan tempat dimana dinamika keamanan nasional dan keamanan global saling terkait dan saling berhubungan satu sama lain (Syahrin M. N., 2018). Dalam hal ini kawasan merupakan wilayah yang menjadi fokus dimana para aktor saling berhubungan dan menjadi titik dimana terdapat interaksi keamanan nasional dan keamanan global.

Melihat pola interaksi regional di Laut China Selatan, dimana negara-negara anggota ASEAN yang bersengketa dengan China menggunakan mekanisme ASEAN untuk menjamin keamanan negara-negara tersebut. Selain itu, untuk mengantisipasi semakin meningkatnya konflik di Laut China Selatan, maka ASEAN lebih menekankan perdamaian daripada dengan jalan militer dan mengadakan berbagai pertemuan puncak untuk menyelesaikan konflik di Laut China Selatan.

B. *Smart Maritime Diplomacy*

Diplomasi Maritim (*Maritime Diplomacy*) merupakan istilah baru yang telah diperbarui dan didefinisikan ulang dari istilah yang dulu dikenal sebagai *Gunboat Diplomacy*. *Gunboat Diplomacy* adalah istilah yang tampaknya paling cocok digunakan pada zaman dulu. Istilah ini menggambarkan kapal perang Eropa yang bermanuver di lepas pantai negara berkembang, kadang-kadang juga membombardir pantai untuk mencari kompensasi. Istilah ini tampaknya semakin tidak relevan karena unipolaritas di tahun 1990-an telah berubah menjadi dunia yang lebih multipolar dan para mantan korban imperalisme, khususnya di Asia, kini mampu mengatasi mantan penguasa kolonial (Miere, 2014).

Gunboat Diplomacy telah digunakan oleh negara-negara maju dan berkembang dalam beberapa tahun terakhir. *Gunboat Diplomacy* mempertahankan relevansinya melalui kegunaannya, dimana diplomasi ini merupakan pengejaran yang memungkinkan aktor untuk memaksa orang lain sambil menghindari konflik besar dan biaya yang digunakannya (Miere, 2014). Namun, kemajuan teknologi juga telah mengakibatkan penerapan *Gunboat Diplomacy* menjadi ketinggalan zaman. Selain itu, telah muncul berbagai aktor non-militer yang memiliki efek serupa dengan aktor militer dari angkatan laut pada *Gunboat Diplomacy*.

Diplomasi Maritim merupakan salah satu bentuk diplomasi yang menggunakan kekuatan maritim sebagai instrumen dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Mengacu pada lampiran buku *Maritime Diplomacy in the 21st Century* dalam hal. 7, yaitu:

“Diplomacy is, after all, simply the management of international relations, and Maritime Diplomacy is therefore the management of international relations through the maritime domain. This does not mean the use of diplomacy to manage maritime tensions, through the codification of international law, for instance, but the use of maritime assets to manage the relations themselves.” (Miere, 2014).

Dalam buku *Maritime Diplomacy in the 21st Century* pada hal. 7 dijelaskan bahwa jika diplomasi sendiri diartikan sebagai manajemen hubungan internasional, maka diplomasi maritim adalah manajemen hubungan internasional melalui ranah maritim (Agussalim Burhanuddin, 2021). Dalam hal ini, diplomasi tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan konflik dan ketegangan antarnegara terkait isu maritim melalui penyusunan instrumen hukum internasional.

Diplomasi Maritim merupakan strategi penggunaan kemampuan nasional yang sejalan dengan isu keamanan maritim nasional dan internasional. Diplomasi maritim dilakukan melalui upaya penguatan kerja sama di bidang maritim dan juga sebagai upaya penanganan terhadap suatu konflik, seperti sengketa wilayah, pelanggaran terhadap kedaulatan suatu negara, pencurian ikan, dan sebagainya, dengan menekankan fakta bahwa laut bukan memisahkan, tetapi laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara (Ramadhanti, 2019).

Diplomasi Maritim tidak hanya melibatkan aktor-aktor seperti diplomat, tetapi juga melibatkan aktor-aktor lain, seperti marinir, penjaga pantai (*coast guard*), dan pasukan militer lainnya, yang juga merupakan agen utama dan representasi dari negara (Miere, 2014). Selain itu, adapula aktor lain yang terlibat dalam diplomasi maritim seperti analis dan akademisi yang mengkaji mengenai

perkembangan yang sedang terjadi terutama mengenai isu-isu hubungan internasional.

Menurut Christian Le Miere, Diplomasi Maritim dapat secara ringkas dibagi menjadi Diplomasi Maritim Kooperatif, Persuasif, dan Koersif (Miere, 2014). Ketiga bentuk diplomasi maritim yang dimaksud lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

1. Diplomasi Maritim Kooperatif (*Co-operative Maritime Diplomacy*)

Diplomasi Maritim Kooperatif (*Co-operative Maritime Diplomacy*) yaitu salah satu bentuk diplomasi maritim yang dilakukan dengan cara melalui kerja sama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan khususnya yang berkaitan dengan aspek maritim. Mengacu pada lampiran buku *Maritime Diplomacy in the 21st Century* dalam hal. 11, yaitu:

“Co-operative Maritime Diplomacy does not aim to bully, deter or compel, nor to forcefully persuade. Rather, it uses the tools of attraction, co-option and inspiration to entice or reassure other governments.” (Miere, 2014).

Dalam buku *Maritime Diplomacy in the 21st Century* pada hal. 11 dijelaskan bahwa pada dasarnya Diplomasi Maritim Kooperatif ini tidak bertujuan untuk menghalangi atau memaksa, menggertak ataupun membujuk secara paksa. Akan tetapi, diplomasi ini lebih mengutamakan metode bagaimana untuk menarik perhatian dari negara lain dengan menggunakan alat daya tarik, kooptasi, maupun inspirasi.

Ada pula usaha-usaha lain yang dapat dilakukan untuk menginspirasi negara lain sehingga dapat lebih berpengaruh. Mengacu pada lampiran buku *Maritime Diplomacy in the 21st Century* dalam hal. 9, yaitu:

“Co-operative Maritime Diplomacy can therefore also be designed to build coalitions, support allies through capacity building, training and harmonisation of techniques and build confidence among nations wary of one’s naval power.” (Miere, 2014).

Dalam buku *Maritime Diplomacy in the 21st Century* pada hal. 9 dijelaskan bahwa Diplomasi Maritim Kooperatif ini dapat juga ditujukan untuk membentuk koalisi, mendukung sekutu melalui peningkatan kapasitas, pelatihan dan harmonisasi, serta membangun kepercayaan dengan negara-negara yang mencurigai kekuatan maritim negara lain.

Diplomasi maritim kooperatif ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti kunjungan (*Port Calls*), latihan dan pelatihan gabungan (*Joint Exercises and Trainings*). Kunjungan oleh angkatan laut ke negara-negara besar dan kecil sering dimaksudkan untuk membangun pengaruh diplomatik dan memperkuat aliansi. Latihan-latihan juga bertujuan untuk membangun kapasitas di angkatan laut yang kurang mampu atau berpengetahuan luas. Latihan bersama atau operasi keamanan maritim juga dapat memperkuat hubungan antara sekutu atau meyakinkan saingan potensial mengenai sifat angkatan laut sendiri yang tidak mengancam (Miere, 2014).

Dalam kasus Laut China Selatan, Indonesia melalui *Co-operative Maritime Diplomacy* telah melakukan beberapa bentuk kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral dengan melalui latihan bersama, patroli bersama, dan sebagainya. Adapun latihan bersama yang dilakukan oleh Indonesia, seperti Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali dan

Indonesia menjadi tuan rumah dengan sejumlah negara sahabat yang hadir dari berbagai belahan dunia. Selain itu, ada juga patroli bersama yang dilakukan dengan beberapa Angkatan Laut negara anggota ASEAN. Bahkan juga telah dilakukan latihan perang antara Angkatan Laut Indonesia dengan Angkatan Laut China.

2. Diplomasi Maritim Persuasif (*Persuasive Maritime Diplomacy*)

Ada beberapa cara dimana angkatan laut maupun badan maritim digunakan untuk tujuan politik di masa damai, tetapi tidak bersifat kooperatif. Salah satunya dapat digambarkan sebagai *Persuasive Maritime Diplomacy*. Mengacu pada lampiran buku *Maritime Diplomacy in the 21st Century* dalam hal. 12, yaitu:

“Rather, the goals of Persuasive Maritime Diplomacy are to increase recognition of one’s maritime or national power, and build prestige for the nation on the international stage. It is neither directed towards a particular recipient nor intended to strike fear into potential opponents. Rather, it aims to persuade others that one’s own navy (or general military) is present and effective.” (Miere, 2014).

Dalam buku *Maritime Diplomacy in the 21st Century* pada hal. 12 dijelaskan bahwa tujuan Diplomasi Maritim Persuasif adalah untuk meningkatkan pengakuan terhadap kekuatan maritim atau kekuatan nasional suatu negara, serta untuk membangun reputasi bangsa di tingkat internasional. Diplomasi ini tidak ditujukan kepada negara tertentu dan juga tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti lawan potensial. Akan tetapi, diplomasi ini bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa Angkatan Laut atau Angkatan Militer negara tersebut hadir dan efektif.

Diplomasi ini disebut cukup mirip dengan yang dulu dikenal sebagai ‘*showing the flag*’, dimana kapal angkatan laut hanya digunakan untuk memberi sinyal kehadiran dan kemampuan suatu negara tanpa harus berupaya mempengaruhi kebijakan negara lain. Contoh yang paling jelas dari peristiwa diplomatik semacam itu adalah *Great White Fleet*, yang mengelilingi dunia antara Desember 1907 dan Februari 1909. Presiden AS Theodore Roosevelt, yang terdiri dari skuadron kapal perang dan pengawalannya, mengecat kapal militer dengan warna putih untuk menggambarkan tujuan damai dan mengirim kapal militer untuk melakukan tur dunia (Miere, 2014). Sederhananya, operasi ini dilakukan sebagai isyarat status baru US sebagai kekuatan global baru. Meski demikian, jelas bahwa efek diplomatis yang ditimbulkan dari Diplomasi Maritim Persuasif ini masih sulit diukur keberhasilannya.

Dalam kasus Laut China Selatan, Indonesia melalui *Persuasive Maritime Diplomacy* lebih banyak melakukan upaya penyelesaian dengan melalui mekanisme ASEAN. Dimana Indonesia secara aktif telah mendorong implementasi DOC dan turut aktif berperan dalam proses penyusunan COC. Kemudian, Indonesia juga memiliki peran penting dalam keberhasilan anggota ASEAN mencapai kesepakatan *joint communique* pada pertemuan AMM ke-49. Selain itu, Indonesia juga turut berperan dalam mendorong CUES dan *Hotline of Communications* di Laut China Selatan. Serta peran penting Indonesia atas inisiasi *Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea* yang diadakan setiap tahun sejak tahun 1990.

3. Diplomasi Maritim Koersif (*Coercive Maritime Diplomacy*)

Diplomasi Maritim Koersif ini salah satu bentuk diplomasi maritim yang bersifat memaksa dan mengancam dengan menggunakan kekuatan militer, seperti AL yang digunakan oleh suatu negara untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di perairan. Personel militer dalam hal ini menjadi representasi negara yang akan melakukan penembakan, penyergapan, dan penyerangan terhadap pihak yang telah melakukan pelanggaran di teritorial laut negara tersebut. Mengacu pada lampiran buku *Maritime Diplomacy in the 21st Century* dalam hal. 14, yaitu:

“Coercive Maritime Diplomacy is essentially a demonstration of the intent and/or capabilities of an actor in a dispute, disagreement or political dialogue. The intensity of the diplomacy, the assets used and the threats or statements issued at the time are all excellent signs of the importance of an issue to that actor and the lengths to which they will go to protect these interests.” (Miere, 2014).

Dalam buku *Maritime Diplomacy in the 21st Century* pada hal. 14 dijelaskan bahwa Diplomasi Maritim Koersif pada hakikatnya adalah untuk menunjukkan maksud atau kemampuan suatu negara dalam sebuah perselisihan atau dialog politik. Kekuatan diplomasi, cara yang digunakan, dan ancaman atau pernyataan yang dibuat pada saat itu, semuanya merupakan tanda yang sangat baik tentang betapa pentingnya masalah itu bagi negara tersebut dan seberapa besar negara itu akan melindungi kepentingan tersebut.

Dalam kasus Laut China Selatan, salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan memperkuat dan meningkatkan

kehadiran militer di Natuna. Selain itu, Indonesia juga terus meningkatkan patroli laut oleh Angkatan Laut, KKP, dan Bakamla. Dimana semua pihak akan bersinergi dalam menjaga keamanan di perairan Natuna.

Dalam Diplomasi Maritim Indonesia digunakan satu istilah yaitu *Smart Diplomacy*. *Smart Diplomacy* ini dapat diartikan sebagai kombinasi dari strategi *Hard Power* dan *Soft Power* dalam diplomasi, dengan mengacu pada kebutuhan kekuatan militer yang dikombinasikan dengan *partnership*, serta aliansi sebagai penyeimbangannya. Karena jika hanya menitikberatkan pada salah satu diplomasi saja, maka tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dunia internasional.

Joseph Nye, mengemukakan bahwa strategi yang paling efektif pada kebijakan luar negeri suatu negara saat ini adalah dengan mengkombinasikan antara sumber-sumber *Hard Diplomacy* dan *Soft Diplomacy*. Dr. Chester A. Crocker, pengamat politik luar negeri AS, menjelaskan bahwa *smart power* adalah strategi yang mencakup diplomasi, persuasif, *capacity building* dan penggunaan kekuatan militer untuk mendapatkan justifikasi politik dan sosial (Arfan, 2018).

Berdasarkan dari kedua definisi tersebut, maka dapat dilihat bahwa *Smart Diplomacy* muncul disebabkan oleh anggapan bahwa jika strategi diplomasi hanya berjalan sendirian tanpa berkesinambungan satu sama lain, disitulah diplomasi tidak akan berjalan efektif. Sehingga diperlukan kombinasi strategi yang mampu mengayomi satu sama lain, yaitu gabungan dari *Hard Power* dan

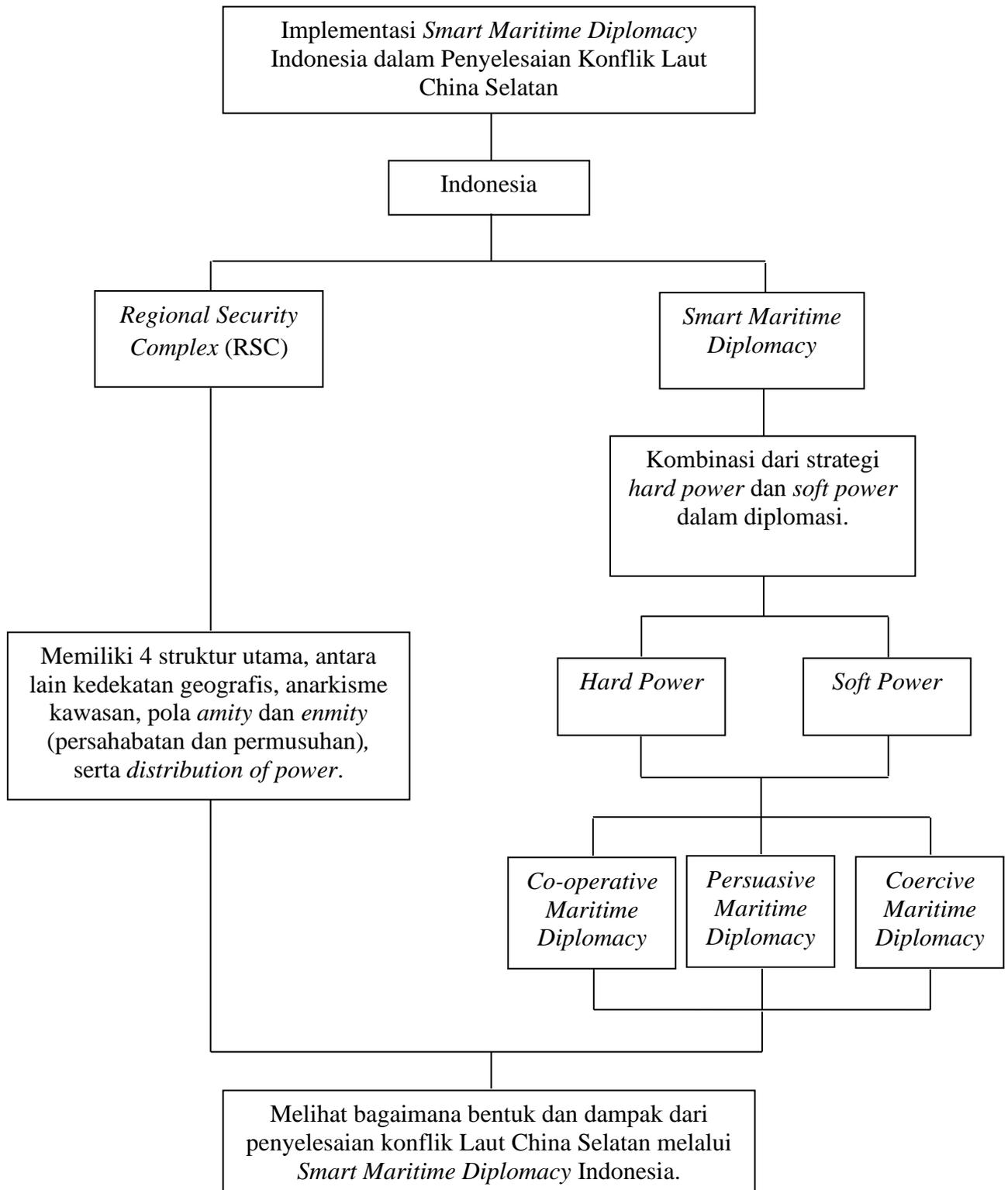
Soft Power dalam diplomasi, yang pada akhirnya akan menunjang bagaimana kebijakan luar negeri suatu negara dapat direalisasikan. Maka dari itu, oleh Najamuddin Khairur Rijal meminjam istilah *smart power* yang diperkenalkan oleh Joseph Nye, *Smart Maritime Diplomacy* yang dimaknai sebagai bentuk integrasi antara kekuatan atau pendekatan *hard power* dan *soft power* dalam diplomasi (Rijal, 2013).

Soft power dalam diplomasi merupakan sebuah konsep yang pertama kali dicetuskan oleh Joseph Nye pada tahun 1990, dalam bukunya *soft power: The means to success in world politics*. Dimana Joseph Nye mengartikan *soft power* sebagai kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan daya tarik dibanding dengan paksaan atau imbalan. Selain itu, Joseph Nye juga mengartikan *soft power* sebagai kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan melalui kerja sama dan ketertarikan. Pada hakekatnya, *soft power* ini merupakan suatu kekuatan yang didasarkan pada pengguna *intangible sources*, seperti kesenian (*culture*) dan *value* yang digunakan untuk memikat hati dan pikiran masyarakat dari negara lain, sekaligus juga sebagai modalitas untuk pencapaian tujuan nasional suatu negara (Joseph S. Nye, 2004).

Penggunaan *soft power* ini merupakan perwujudan kekuatan dari diplomasi publik, disamping itu *soft power* ini juga merupakan perwujudan dari *hard power* yang keberadaannya masih dianggap kontroversi untuk dikritisi oleh penganut paham Realis. Dimana penganut paham Realis mengatakan bahwa dunia internasional masih sarat dengan konflik-konflik kekerasan yang menggunakan kekuatan bersenjata. Sehingga, sebagai upaya penanganannya maka masih memerlukan adanya kekuatan ekonomi dan militer sebagai sarana penekan dan

penumpas aksi-aksi kekerasan tersebut. Bahkan dinyatakan lebih lanjut bahwa landasan *soft power* bagi setiap negara pada hakekatnya juga bertumpu pada *hard power* yang dimiliki. Dengan kata lain, pengembangan *soft power* dari suatu negara dapat sukses bila ditunjang oleh kemampuan militer dan ekonomi yang merupakan dimensi dari *hard power* (Joseph S. Nye, 2004).

Bagan 1.2 Kerangka Konsep Penelitian



Source: Diolah dari berbagai sumber.

Dalam bagan tersebut, penulis menekankan bahwa konsep *Regional Security Complex* (RSC) merupakan konsep yang digunakan untuk melihat bagaimana bentuk kompleksitas keamanan di kawasan Laut China Selatan. Dimana konsep ini memiliki 4 struktur utama yang menjadi dasar terciptanya RSC, yaitu kedekatan geografis, anarkisme kawasan, polaritas kekuatan (*distribution of power*), dan konstruksi sosial berupa *amity* dan *enmity*.

Konsep lain yang digunakan oleh penulis adalah *Smart Maritime Diplomacy* yang juga digunakan sebagai pendekatan dalam Diplomasi Maritim Indonesia untuk penyelesaian konflik di Laut China Selatan. Konsep ini merupakan kombinasi dari strategi *hard power* dan *soft power* dalam diplomasi dengan melalui tiga bentuk diplomasi maritim yang diperkenalkan oleh Miere, yaitu diplomasi maritim kooperatif (*Co-operative Maritime Diplomacy*), diplomasi maritim persuasif (*Persuasive Maritime Diplomacy*), dan diplomasi maritim koersif (*Coercive Maritime Diplomacy*).

Berdasarkan dari konsep-konsep tersebut, penelitian ini selanjutnya akan menjabarkan bagaimana bentuk dan dampak dari penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui *Smart Maritime Diplomacy* Indonesia. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan konsep-konsep yang telah dipaparkan sebelumnya sebagai pisau bedah dalam penelitian ini.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam memperkuat keilmiahannya penulisan, maka penulis menggunakan beberapa *literature review* yang terkait dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari *literature review* ini adalah untuk memberikan informasi kepada penulis. Selain itu, *literature review* ini juga digunakan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan untuk kebaruan dalam tulisan yang diajukan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis menggunakan lima *literature review* yang ditulis oleh Najamuddin Khairur Rijal, Sandy Nur Ikfal Raharjo, Hendra Maujana Saragih, R. Wing Witjahyo O.W. Poespojoedho, dan Gerald Theodorus L.Toruan. Adapun *literature review* yang dimaksud akan dijelaskan lebih rinci pada pembahasan selanjutnya.

Penelitian yang pertama, yaitu *Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia* yang ditulis oleh Najamuddin Khairur Rijal pada tahun 2013. Tulisan ini membahas mengenai upaya Diplomasi Maritim Indonesia untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia (PMD) di kawasan Asia Tenggara. Tulisan ini berfokus pada upaya diplomasi maritim di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan mengintegrasikan dua pendekatan diplomasi maritim, yaitu melalui upaya diplomasi maritim dalam bentuk *hard diplomacy* dan *soft diplomacy*. Upaya diplomasi dalam bentuk *hard diplomacy* yang dimaksud adalah dengan melalui tindakan koersif dalam bentuk kebijakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran di wilayah perairan Indonesia, seperti *illegal fishing*. Kemudian, upaya diplomasi yang dilakukan dalam bentuk *soft diplomacy* adalah dengan melalui kerja sama dan persuasi.

Adapun kesamaan tulisan ini dengan tulisan yang diajukan oleh penulis adalah upaya diplomasi maritim dengan melalui tiga bentuk diplomasi maritim menurut *Christian Le Miere*, yaitu diplomasi maritim kooperatif, diplomasi maritim persuasif, dan diplomasi maritim koersif. Selain itu, dalam tulisan ini juga menggunakan istilah *Smart Maritime Diplomacy* yang berarti dengan mengintegrasikan antara pendekatan *hard diplomacy* dengan *soft diplomacy*. Kemudian, waktu penelitian dalam tulisan ini juga sama dengan waktu penelitian penulis, dimana penulis juga membatasi tahun penelitian pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Disamping kesamaan, ada pula beberapa perbedaan dalam tulisan ini dengan tulisan yang diajukan oleh penulis. Dimana dalam tulisan ini membahas mengenai upaya Diplomasi Maritim Indonesia yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita Poros Maritim Dunia (PMD) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sedangkan, dalam tulisan yang diajukan oleh penulis membahas mengenai upaya Diplomasi Maritim Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan.

Penelitian yang kedua, yaitu Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan yang ditulis oleh Sandy Nur Ikfal Raharjo pada tahun 2014. Dalam tulisan ini dibahas mengenai gambaran umum terkait Laut China Selatan yang menjadi potensi ancaman bagi kepentingan nasional Indonesia. Kemudian, tulisan ini juga membahas bagaimana peran Indonesia dalam upaya penyelesaian terhadap sengketa Laut China Selatan. Dalam hal ini, dijelaskan lebih rinci mengenai apa landasan peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa, apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam penyelesaian sengketa,

dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa di wilayah tersebut.

Adapun kesamaan tulisan ini dengan tulisan yang diajukan oleh penulis adalah terkait upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh Indonesia sejak tahun 1990-an. Akan tetapi, dalam tulisan ini hanya membahas mengenai upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan oleh Indonesia melalui perundingan-perundingan secara damai. Sedangkan, dalam tulisan yang diajukan oleh penulis mencakup lebih luas mengenai upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan yang telah dilakukan oleh Indonesia, seperti upaya penyelesaian melalui bentuk kerja sama atau kooperatif, perundingan, dan dengan cara koersif.

Kemudian penelitian yang ketiga, yaitu Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan yang ditulis oleh Hendra Maujana Saragih pada tahun 2018. Dalam tulisan ini membahas mengenai upaya diplomasi Indonesia dari perspektif pertahanan untuk mengelola sengketa di wilayah Laut China Selatan. Dalam tulisan ini digunakan beberapa konsep/teori, seperti Diplomasi Pertahanan, Keamanan, Perimbangan Kekuatan (*Balance of Power*), dan konsep Penangkalan (*Deterrence*). Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya Indonesia dalam melakukan Diplomasi Pertahanan terhadap konflik di Laut China Selatan.

Adapun kesamaan tulisan ini dengan tulisan yang diajukan oleh penulis adalah upaya-upaya penyelesaian konflik di Laut China Selatan yang telah dilakukan oleh Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Akan tetapi, dalam tulisan ini dibahas terkait upaya penyelesaian konflik di Laut China Selatan dengan melalui Diplomasi Pertahanan. Sedangkan, dalam tulisan yang

diajukan oleh penulis membahas mengenai upaya penyelesaian konflik di Laut China Selatan melalui Diplomasi Maritim.

Selanjutnya penelitian yang keempat, yaitu *Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo* yang ditulis oleh R. Wing Witjahyo O.W. Poespojoedho pada tahun 2019. Tulisan ini membahas mengenai kebijakan Indonesia dengan menggunakan *naval diplomacy* sebagai cara untuk mencapai resolusi konflik yang efektif di Laut China Selatan. Kemudian, dalam tulisan ini digunakan konsep *naval diplomacy* dan *sea power* untuk menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam merespon konflik di Laut China Selatan yang mencakup teritori Indonesia, yaitu perairan Natuna.

Adapun kesamaan tulisan ini dengan tulisan yang diajukan oleh penulis adalah dalam hal upaya penyelesaian melalui *coalition building* dan *coercion*. Dimana pada beberapa bentuk dalam diplomasi maritim, *coalition building* termasuk dalam bentuk diplomasi maritim kooperatif dan *coercion* termasuk dalam bentuk diplomasi maritim koersif. Akan tetapi, dalam tulisan ini membahas mengenai upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui *coalition building* dan *coercion* sebagai bentuk dari *naval diplomacy*. Dimana dalam *naval diplomacy* ini aktor yang terlibat adalah Angkatan Laut. Sedangkan, dalam tulisan yang diajukan oleh penulis membahas mengenai upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui diplomasi maritim yang dimana aktornya tidak lain adalah Diplomat, Angkatan Laut, *Coast Guard*, dan aktor lainnya.

Terakhir, penelitian yang kelima adalah Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional yang ditulis oleh Gerald Theodorus L.Toruan pada tahun 2020. Dalam tulisan ini dijelaskan mengenai posisi Indonesia dalam konflik Laut China Selatan dan peran Indonesia dalam penyelesaian konflik tersebut. Selain itu, tulisan ini juga menggunakan konsep Konflik Internasional, Keamanan Nasional (*National Security*), dan Stabilitas Keamanan Nasional.

Adapun kesamaan tulisan ini dengan tulisan yang diajukan oleh penulis adalah mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan. Namun, dalam tulisan ini hanya dibahas mengenai upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam bentuk *soft diplomacy* dengan melalui mekanisme ASEAN. Sedangkan, dalam tulisan yang diajukan oleh penulis membahas mengenai upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan melalui Diplomasi Maritim Indonesia yang mengkombinasikan antara *soft diplomacy* dengan *hard diplomacy*, baik melalui mekanisme ASEAN maupun melalui peran Indonesia sebagai *honest broker*.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

JUDUL YANG DIAJUKAN	JUDUL / PENULIS	FOKUS PENELITIAN	PERBEDAAN FOKUS PENELITIAN
	<p><i>Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia</i> Oleh Najamuddin Khairur Rijal</p>	<p>Upaya diplomasi maritim Indonesia di Kawasan Asia Tenggara pada masa pemerintahan Joko Widodo untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia (PMD).</p>	<p>Penelitian terdahulu: Fokus pada upaya Diplomasi Maritim Indonesia untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia (PMD). Penelitian oleh penulis: Fokus pada upaya Diplomasi Maritim Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan.</p>
<p>IMPLEMENTASI SMART MARITIME DIPLOMACY INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN</p>	<p>Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan Oleh Sandy Nur Ikfal Raharjo</p>	<p>Upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan yang telah dilakukan oleh Indonesia.</p>	<p>Penelitian terdahulu: Fokus pada upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan oleh Indonesia melalui perundingan-perundingan secara damai. Penelitian oleh penulis: Fokus pada upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan oleh Indonesia yang mencakup lebih luas, seperti kerjasama/kooperatif, perundingan, dan koersif.</p>
	<p>Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan Oleh Hendra Maujana Saragih</p>	<p>Upaya diplomasi Indonesia dari perspektif pertahanan untuk mengelola sengketa di wilayah Laut China Selatan.</p>	<p>Penelitian terdahulu: Fokus pada upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui Diplomasi Pertahanan. Penelitian oleh penulis: Fokus pada upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui Diplomasi Maritim.</p>

***Naval Diplomacy:*
Upaya Defensif
Indonesia dalam
Konflik Laut Tiongkok
Selatan di Era Joko
Widodo**

Oleh R. Wing Witjahyo
O.W. Poespojoedho

Kebijakan Indonesia dengan menggunakan *naval diplomacy* sebagai cara untuk mencapai resolusi konflik yang efektif di Laut China Selatan.

Penelitian terdahulu:

Fokus pada upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui Diplomasi Angkatan Laut (*Naval Diplomacy*).

Penelitian oleh penulis: Fokus pada upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui Diplomasi Maritim (*Maritime Diplomacy*).

**Peran Strategis
Indonesia dalam
Penyelesaian Konflik
Laut China Selatan
dalam Perspektif
Stabilitas Keamanan
Regional**

Oleh Gerald Theodorus
L. Toruan

Posisi Indonesia dalam konflik Laut China Selatan dan peran Indonesia dalam penyelesaian konflik tersebut.

Penelitian terdahulu:

Fokus pada upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam bentuk pendekatan *soft diplomacy* melalui mekanisme ASEAN.

Penelitian oleh penulis: Fokus pada upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam bentuk kombinasi antara pendekatan *soft power* dan *hard power* dalam diplomasi dengan melalui mekanisme ASEAN dan Indonesia sebagai *honest broker*.

Source: Diolah dari berbagai sumber.